

SIARAN PERS

Nomor: 25/HMS/SP/VIII/2026

TANGGAL:
21 Agustus 2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif di Asparaga

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo memperkuat pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui kegiatan **Apel Pengawasan Partisipatif dan Konsolidasi Demokrasi** di SMAN 1 Asparaga, Kecamatan Asparaga, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran Pemilu.

Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo **Zulfikar A. Uba** mengajak siswa-siswi SMAN 1 Asparaga untuk memahami bahaya politik uang serta turut menyampaikan pesan pencegahannya kepada lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

“Pengawasan Pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi masyarakat juga harus mengambil bagian. Generasi muda bisa ikut mengawasi dan menyampaikan edukasi di lingkungannya,” ujar Zulfikar.

Ia mengingatkan agar pilihan politik tidak ditentukan oleh pemberian uang atau imbalan. Menurutnya, pemilih perlu menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, integritas, dan kemampuan calon dalam menjalankan amanah.

“Jangan sampai pilihan kita ditentukan karena uang. Pilihlah pemimpin berdasarkan visi, misi, integritas, dan kemampuan untuk menjalankan amanah,” tegasnya.

Zulfikar juga mendorong siswa untuk menyampaikan edukasi mengenai bahaya politik uang kepada orang tua, teman, keluarga, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Menurutnya, penyebaran pesan secara berantai dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo **Alexander Kaaba** mengingatkan adanya sejumlah catatan pengawasan di Kecamatan Asparaga yang perlu menjadi

perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Salah satunya berkaitan dengan persoalan netralitas kepala desa yang pernah terjadi pada penyelenggaraan tahun 2020 dan 2024.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai pengalaman yang kurang baik terulang kembali. Karena itu, pencegahan harus diperkuat melalui sosialisasi dan keterlibatan masyarakat,” ujar Alexander.

Menurut Alexander, pengawasan partisipatif penting untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga tingkat akar rumput. Keterbatasan sumber daya manusia dalam proses perekrutan pengawas ad hoc, mulai dari tingkat kecamatan, desa, hingga Pengawas TPS (PTPS), menjadi salah satu alasan perlunya keterlibatan masyarakat.

Ia secara khusus mengingatkan para siswa yang nantinya menjadi pemilih pemula untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Siswa yang telah memenuhi usia 17 tahun pada saat Pemilu mendatang juga diingatkan untuk segera mengurus KTP elektronik sebagai salah satu dokumen kependudukan yang diperlukan untuk menggunakan hak pilih.

“Adik-adik adalah generasi penerus bangsa. Kalian yang akan menentukan masa depan, bahkan nantinya bisa menjadi penyelenggara Pemilu, baik di Bawaslu maupun KPU,” katanya.

Alexander juga mengingatkan pentingnya asas **Luber Jurdil**, termasuk kebebasan menentukan pilihan tanpa tekanan maupun imbalan serta jaminan kerahasiaan pilihan pemilih. Selain politik uang secara langsung, ia mengingatkan adanya potensi pemberian keuntungan melalui sarana digital, seperti saldo elektronik maupun top up gim dengan imbalan dukungan kepada calon tertentu.

Menurutnya, perkembangan pola tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya bagi pemilih muda yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital. Pemahaman terhadap berbagai bentuk potensi pelanggaran diperlukan agar masyarakat mampu mengenali, menolak, dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.

Alexander berharap Kecamatan Asparaga ke depan dapat dikenal karena prestasi dan partisipasi positif masyarakatnya dalam demokrasi.

“Harapan kami, Asparaga ke depan menjadi yang terbaik di Bawaslu karena prestasinya, bukan karena pengalaman yang kurang baik,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diwarnai dialog bersama siswa yang membahas sejumlah persoalan, antara lain praktik suap untuk memengaruhi pilihan politik serta persoalan judi online dan pengawasan terhadap transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mendorong generasi muda dan masyarakat untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi turut mengambil bagian dalam menjaga proses demokrasi. Penguatan edukasi, pencegahan, dan pengawasan partisipatif diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mencegah terulangnya berbagai pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

Email: humasbawaslukabgor@gmail.com

Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id